

## ABSTRACT

**Kaminus. 2020. Koto Pulai As The Central Government Of The District Of The Pesisir Selatan Kerinci (PSK) 1949. Tesis. Graduate Program of Universitas Negeri Padang.**

The establishment of an emergency government in the Kerinci Selatan Regency was the result of instructions from the Rasjid Resident as the Governor of West Sumatra Meliter, in which the Governor of Rasjid sent several delegates of the Governor's staff to the regions. The Government of the South Coastal District of Kerinci on January 2, 1949, which was in Koto Pulai and ended on July 14, 1950, the role of the people and the government of the South Coastal District of Kerinci in maintaining the independence of the Republic of Indonesia from the threat of Dutch military aggression II, researchers wanted to see how Koto Pulai was chosen as the center of government Pesisir Selatan Kerinci Regency, how is the policy of the Government of Pesisir Selatan Kerinci Regency, and how the participation of the Koto Pulai community in the administration of the South Pesisir Regency in Kerinci in 1949. So that the Kerinci Selatan Pesisir Selatan government can be held in Koto Pulai.

Historical research methods, in this study data collection is done by Heuristics (collecting sources), consisting of: (a). Literature Study interviews. Criticism (verification). Interpretation (reinterpretation). Historiography.

Koto Pulai is a strategic area that is in a cross position, with a very strategic location that makes it easy to deal with fellow warlords in the South Coast, both warlords who come from Tapan or from the Shadows. PSK governance policies, in the economic field: (a). Printing Oeang Republik Indonesia (ORI) Lengayang. (b). Money of the Republic of Indonesia Temporary Payment (URIPS). Defense sector: (a). Fundraising. (b). Forming Assistance Forces to Help PDRI Fighters. (c). Collecting War Contribution to the Community. The Koto Pulai community provides assistance in the form of shelter for PDRI fighters, and fulfills all the needs of PDRI fighters in Koto Pulai without being paid.

## ABSTRAK

**Kaminus. 2020. Koto Pulai Sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci (PSK) Tahun 1949. Tesis. Pascasarjana Universitas Negeri Padang.**

Pembentukan pemerintahan darurat di Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci merupakan hasil instruksi Residen Rasjid sebagai Gubernur Meliter Sumatra Barat, yang mana Gubernur Rasjid mengirim beberapa utusan staf Gubernur ke daerah-daerah. Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci pada 2 Januari 1949 yang berada di Koto Pulai dan berakhir pada 14 Juli 1949, peran masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci dalam mempertahankan kemerdekaan RI dari ancaman agresi militer Belanda II, peneliti ingin melihat bagaimana Koto Pulai dipilih sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, bagaimana kebijakan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, serta bagaimana partisipasi masyarakat Koto Pulai dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci tahun 1949. Sehingga pemerintahan Pesisir Selatan Kerinci bisa diselenggarakan di Koto Pulai.

Metode penelitian sejarah, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan Heuristik (mengumpulkan sumber), terdiri dari: (a).wawancara Studi Pustaka. Kritik (verifikasi). Interpretasi (penafsiran kembali). Historiografi .

Koto Pulai merupakan daerah yang strategis yang berada di posisi silang, dengan letak yang sangat strategis yang memudahkan dalam berhubungan antar sesama wali perang yang ada di Pesisir Selatan, baik wali perang yang datang dari Tapan maupun dari Bayang. Kebijakan pemerintahan PSK, bidang ekonomi: (a). Mencetak Oeang Republik Indonesia (ORI) Lengayang. (b). Uang Republik Indonesia Pembayaran Sementara (URIPS). Bidang pertahanan: (a). Penggalangan dana. (b). Membentuk Pasukan Bantuan Untuk Membantu Para Pejuang PDRI. (c). Melakukan Pemungutan Iuran Perang Pada Masyarakat. Masyarakat Koto Pulai memberikan berupa bantuan tempat tinggal bagi para pejuang PDRI, serta memenuhi semua kebutuhan pejuang PDRI yang berada di Koto Pulai tanpa dibayar.